BAB III
SEJARAH TASWIRUL AFKAR

A. Latar Belakang Berdirinya Taswirul Afkar

Setelah menimba ilmu selama kurang lebih empat tahun lamanya di Mekkah, pada tahun 1914 Kiai Wahab kembali ke tanah air. Pada tahun tersebut bersamaan pula dengan menjelang meletusnya Perang Dunia I dan pada saat itu juga rakyat Indonesia juga berada dalam cengkeraman kolonial. Kiai Wahab tidak bisa bertopang dagu melihat rakyat Indonesia yang terjajah tersebut hidup dalam kesengsaraan. Ia juga tidak rela melihat kaum santri direndahkan, baik oleh para penjajah maupun oleh bangsa sendiri, yaitu kalangan para priayi. Selain keterpurukan yang dialami oleh kaum pribumi sebagai inisiatif berdirinya Taswirul Afkar, beberapa organisasi lain juga turut menjadi inspirasi bagi Kiai Wahab untuk mewadahi para intelektual muslim di Taswirul Afkar.

Sebelumnya, pada pertengahan abad ke-19 M sampai dengan awal abad ke-20 kondisi masyarakat pribumi sangat terpuruk, khususnya di Jawa. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Belanda, demi mendapatkan kesejahteraan negaranya mereka berusaha untuk memonopoli rakyat Indonesia dengan diterapkannya sistem Tanam Paksa. Johannes van den Bosch (1780-1844) selaku pengusul sistem Tanam Paksa (*cultuurstelsel*) pada tahun 1830 berhasil menjadi gubernur jenderal yang baru di Jawa.[1] Sistem Tanam Paksa yang ia terapkan berhasil memeras hasil jerih payah

[1]Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, terj. Handoyo (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum pribumi. Menurutnya, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditas ekspor (khususnya kopi, tebu dan nila) untuk dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan.[2] Dari rancangan tersebut dapat dipastikan antara kaum pribumi dan pihak Belanda sama-sama mendapatkan keuntungan. Namun, apa yang diharapkan oleh kaum pribumi justru jauh berbanding terbalik. Penyelewengan dan korupsi pun terjadi.

Situasi dan kondisi inilah yang menyebabkan keresahan sosial masyarakat pribumi, sehingga dengan kondisi tersebut maka muncul berbagai perlawanan dalam bentuk peperangan. Perang Paderi (1821-1838 M), Perang Diponegoro (1825-1830 M) dan Perang Aceh (1837-1912 M) merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda.

Pada permulaan awal abad ke-20 M Belanda mulai mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kebijakan kolonial Belanda kini memiliki tujuan baru, sebagai pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia akibat eksploitasi yang telah mereka lakukan, maka pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan baru yang dinamakan dengan "politik etis" sebagaimana yang telah dicantumkan dalam jurnal Belanda *de Gids* oleh C. Th. van Deventer (1857-1915 M) dengan artikel yang berjudul "Een eerrschuld", "suatu utang kehormatan".[3]

---

[2]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. Tim Penerjemah Serambi (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), 260.
[3]Ibid., 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Politik Etis

Politik etis atau yang biasa disebut dengan istilah politik balas budi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas. Politik etis tersebut muncul setelah adanya kecaman-kecaman terhadap pemerintan bangsa Belanda yang dilontarkan dalam novel *Max Havelaar* (1860 M) karya Multatuli (Edward Douwes Dekker).

Setelah meninggalnya C. Th. van Deventer (salah satu kampium politik etis terkemuka), maka pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina (1890-1948) mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa dan pada saat itulah politik etis telah diresmikan. Pada tahun 1902, Alexander W.F. Idenburg selaku Menteri Urusan Daerah Jajahan (1902-1905, 1908-1909, 1918-1919) dan Gubernur Jenderal (1909-1916)[4] telah mempraktikkan pemikiran-pemikiran politik etis ke dalam tiga hal, antara lain:[5]

a. Edukasi (pendidikan), terdapat dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai sistem pendidikan yang akan diterapkan untuk pribumi. Aliran pertama diusulkan oleh Snouck Hurgronje dan J.H. Abendanon, mereka menginginkan pendidikan bergaya Eropa yang hanya diberikan kepada kaum elite saja dengan Bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Demikian mereka dapat mengambil alih pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah berkebangsaan

[4]Ibid., 328.
[5]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia-Belanda* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda sehingga mereka dapat bekerja sama dengan pihak Belanda dan dapat mengendalikan "fanatisme Islam".[6] Sedangkan aliran kedua diusulkan oleh Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heutz (1904-1909) yang menginginkan agar pendidikan diutamakan bagi golongan bawah dengan bahasa Jawa sebagai pengantarnya sehingga diharapkan dengan sistem pendidikan seperti itu dapat mensejahterakan rakyat. Akan tetapi nyatanya apa yang diingiinkan jauh dari apa yang diharapkan oleh pendukungnya.

b. Irigasi (pengairan), sistem daripada politik ini memiliki tujuan untuk membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan serta bendungan untuk keperluan pertanian.

c. Emigrasi (perpindahan penduduk), pada zaman penjajahan Belanda pertambahan jumlah penduduk khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup pesat, sementara penduduk di daerah-daerah luar Jawa masih jarang penduduknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satu-satunya jawaban yang diberikan Belanda adalah emigrasi dari Jawa ke luar Jawa, suatu kebijakan yang masih terus dilanjutkan setelah kemerdekaan Indonesia dengan nama 'transmigrasi'.

Dari beberapa kebijakan politik etis yang diterapkan tersebut pada kenyataannya terdapat lebih banyak janji daripada pelaksanaan dan faktanya. Namun, di sisi lain ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh

[6]Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat pribumi. Sebagian dari mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak meskipun hanya dikhususkan bagi kaum bangsawan saja. Oleh karena itu sebagian dari mereka telah menjadi pemimpin sekaligus berkembang menjadi pencetus sebuah pergerakan kebangkitan nasional yang pada awalnya sebagian besar dimulai dengan melalui perhimpunan sosial-pendidikan. Dari laterbelakang tersebut timbulah gerakan kebangkitan nasional seperti kelompok diskusi Taswirul Afkar, Budi Utomo dan Sarikat Islam.

2. Budi Utomo

Sebagai akibat dari politik etis yang salah satu didalamanya terkandung usaha memajukan pendidikan, maka pada dekade pertama abad ke-20 kaum pribumi masih mengalami hambatan dana belajar. Keadaan tersebut telah menggugah dr. Wahidin Sudirohusodo untuk menghimpun dana pada tahun 1906-1907. Ide tersebut diterima dan dikembangkan oleh Sutomo, seorang mahasiswa STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Arsten*).[7] Dari sinilah awal perkembangan Budi Utomo dapat direalisasikan.

Tepat pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908 organisasi Budi Utomo didirikan. Organisasi untuk kaum muda Jawa ini didirikan oleh Soetomo dengan dibantu oleh beberapa rekan yang mendukungnya, seperti: Goenawan Mangoenkoesoemo, Soewarno, Goembreng,

[7]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Saleh dan Soelaeman. Mereka adalah tokoh-tokoh yang paling banyak jasanya bagi berdirinya Budi Utomo.[8]

Untuk merealisasikan cita-cita Budi Utomo maka diperlukan pengajaran bagi orang Jawa untuk membangkitkan kembali kultur Jawa dengan cara mengkombinasikan antara tradisi, kultur dan sistem pendidikan Barat. Corak baru yang selanjutnya diperkenalkan oleh Budi Utomo adalah kesadaran lokal untuk mewadahi organisasi modern dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota dan yang membedakan organisasi Budi Utomo dengan organisasi yang lain adalah bahwa organisasi ini diikuti oleh organisasi lainnya dan disinilah terjadi perubahan-perubahan sosio-politik.

Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelum berdirinya Budi Utomo, tepatnya pada tahun 1901 di Semarang telah dibentuk sebuah perkumpulan bernama Suria Sumirat atau "Matahari Bersinar". Perkumpulan ini berfungsi untuk mengorganisasi rakyat orang Jawa yang terdiri dari para pengrajin. Lebih tepatnya perkumpulan ini digambarkan sebagai koperasi pengrajin, dimana para anggotanya menerima pendidikan dalam hal pandai besi, pekerjaan perkalengan, pembuatan barang-barang tembaga dan keterampilan semacamnya.[9] Dalam perkumpulan tersebut terdapat kedekatan antara tokoh-tokoh Taswirul Afkar seperti Kiai Wahab dan KH. Mas Mansur dengan organisasi Budi Utomo yang kemudian melahirkan gagasan untuk membentuk wadah

[8]Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*, terj. Pustaka Utama Grafiti dan KITLV (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 189), 64.
[9]Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi bagi para anggota Budi Utomo agar mereka dapat mempelajari agama Islam secara lebih mendalam.[10]

3. Sarekat Islam

Pada tahun 1911 H. Samanhudi mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sarikat Dagang Islam (SDI) di kampung Laweyan kota Surakarta. Anggota-anggotanya adalah para pengusaha batik dari Surakarta. Berdirinya SDI dilatarbelakangi oleh ekonomi rakyat yang pada waktu itu dikuasai oleh golongan Cina seperti bahan-bahan batik yang hanya dapat diperoleh dengan perantara pedagang Cina, mereka mempermainkan harga batik. Demikianlah, timbul usaha dari pengusaha batik di Surakarta untuk mengadakan persatuan demi melawan taktik dagang para pedagang Cina. Dinamakan Sarikat Dagang Islam dikarenakan mayoritas dari pedagang batik tersebut memeluk agama Islam.

Berdirinya SDI disambut baik oleh para pengusaha batik, akan tetapi organisasi tersebut tidak akan disahkan oleh pemerintah apabila tidak terdapat anggaran dasarnya. Karena dirasa H. Samanhudi merasa tidak mampu untuk menyusunnya, maka dia mencari bantuan kepada HOS Tjokroaminoto. Ia adalah seorang pelajar Indonesia yang bekerja pada sebuah perusahaan di Surabaya.[11]

---

[10]Hamim Syahid, *Riwayat Taswirul Afkar*, 1968, 2.
[11]Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, Jilid I (Yogyakarta: LKiS, 2008), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah H. Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto melakukan diskusi, Tjokroaminoto memiliki inisiatif untuk merubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarikat Islam. Alasan tersebut atas pertimbangan bahwa perkumpulan tersebut tidak hanya terbatas pada kaum pedagang saja, akan tetapi juga mempunyai dasar yang lebih luas sehingga orang Islam yang bukan pedagangpun dapat menjadi anggota. Gagasan Tjokroaminoto akhirnya dapat diterima oleh H. Samanhudi dan pada tanggal 10 September 1912 berdirinya Sarikat Islam disampaikan kepada notaris dan selanjutnya dapat disahkan sebagai badan hukum oleh pemerintah.

Tujuan SI adalah mengembangkan perekonomian, demikian pidato yang berkali-kali disampaikan oleh HOS Tjokroaminoto. Ia adalah seorang orator yang cakap dan bijak dan mampu memikat anggotanya. Pada tanggal 26 Januari 1913 tepatnya di Kebun Binatang Surabaya, SI telah mengadakan kongres dan menegaskan bahwa tujuan SI adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia dan mampu bersaing dengan bangsa asing.[12] Secara tidak langsung pidato dari HOS Tjokroaminoto telah menggugah para pendengarnya untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk menuntut keadilan. Salah satu pendengar dari pidatonya adalah Kiai Wahab, dapat disimpulkan bahwa berdirinya Taswirul Afkar adalah

[12]Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, 33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inspirasi dari pidato HOS Tjokroaminoto. dimana pada saat itu Kiai Wahab merupakan salah satu anggota yang bergabung dengan SI.[13]

Usaha untuk meningkatkan ekonomi bangsa telah diterima oleh kalangan *wong cilik*. Mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan sebelumnya yaitu upah kerja yang buruk, sewa-menyewa tanah, masalah-masalah yang berlaku di tanah partikelir dan juga tingkah laku menyakitkan hati yang dilakukan oleh para mandor dan kepala pribumi. Di kalangan rakyat bawah, SI mampu meyedot perhatian rakyat. Di cabang Jakarta SI mempunyai anggota sebanyak 12 ribu orang. Dalam kongresnya di Surabaya jumlah keseluruhan anggotanya menjadi lebih dari 90 ribu orang yang terdiri dari 30 ribu orang dari cabang Solo, 16 ribu orang dari cabang Surabaya, 25 ribu orang dari cabang Jakarta, 23 ribu orang dari cabang Cirebon dan 17 ribu orang dari Semarang.

Dengan terlihatnya peningkatan anggota yang cukup signifikan, pemerintah Hindia-Belanda harus mencermati jejak SI yang dianggapnya berbahaya. Gubernur Jenderal Idenburg (1909-1916) merasa gelisah dengan ancaman yang akan segera datang dengan semakin kuatnya basis SI. Idenburg tidak begitu saja melarang organisasi SI, tetapi ia hanya membuat kanalisasi dalam arti mengurangi desakan kuat sehingga tidak timbul satu kekuatan besar yang dapat menghancurkan eksistensi pemerintah. Hal ini dijabarkan dalam pemberian badan hukum

[13]Yusuf, et al., *Dinamika Kaum Santri*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*rechtpersoon*) kepada SI, sehingga organisasi ini leluasa menjalankan kegiatannya tanpa ada hambatan dari pihak manapun.[14]

4. Gerakan Pembaruan Islam

Tokoh pemikir pembaruan Islam di Timur Tengah baik dari Turki, India, Mesir dan sebagainya secara tidak langsung telah memengaruhi para pemikir Islam di Indonesia. Model pemikiran mereka terlihat berbeda akan tetapi lebih cenderung memiliki tujuan yang sama yaitu adanya keadilan bagi umat Islam dan semangat untuk keluar dari cengkeraman Barat sebagaimana gagasan yang telah dipelopori oleh Jamaludin al-Afghani tentang Pan-Islamisme, dimana ia menginginkan adanya persatuan umat muslim di seluruh dunia. Secara tidak langsung gagasan tersebut telah memengaruhi semangat kebangkitan nasional di Indonesia baik dari para ulama dan golongan nasionalis karena mayoritas negara muslim di Timur Tengah melakukan pemberontakan terhadap penjajah.

Peristiwa tersebut juga memengaruhi beberapa ulama yang sedang menimba ilmu di Mekkah seperti Kiai Wahab, KH. Muhammad Dahlan dan Kiai Asnawi. Mereka telah membentuk suatu perkumpulan Sarikat Islam yang disebut dengan SI Mekkah. Namun, usaha daripada organisasi tersebut tidak dapat berlanjut dikarenakan pada saat itu bersamaan dengan terjadinya peristiwa Perang Dunia I. Peristiwa tersebut memutuskan

[14]Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka untuk kembali ke Indonesia dan di Indonesialah mereka berusaha bergabung lagi dengan SI di Indonesia.

B. Sejarah Berdirinya Taswirul Afkar dan Kegiatannya

Berdasarkan catatan sejarah, dipahami bahwa tiga organisasi pendahulu seperti Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar merupakan embrio utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi ini telah melibatkan tokoh-tokoh pesantren, para saudagar dan simpatisan yang masih memiliki kesamaan cara pandang dan ideologi sebagai penganut Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sekaligus memiliki kecintaan kepada bangsa.[15] Di antara ketiga organisasi tersebut salah satu yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama adalah Taswirul Afkar. Taswirul Afkar berarti "potret pemikiran", ada pula yang mengartikannya sebagai "pergolakan pemikiran".

Taswirul Afkar merupakan suatu kelompok diskusi yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Mas Mansur (1896-1946 M) dan KH. Ahmad Dahlan Achyad (1885-19 M)[16] di Surabaya pada tahun 1914.[17] Taswirul Afkar dijadikan sebagai wadah para ulama baik dari lingkungan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya. Pada

---

[15]Wasid Mansyur, *Biografi Kiai Ahmad Dahlan: Aktivis Pergerakan dan Pembela Ajaran Aswaja* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 37.

[16]KH. Ahmad Dahlan Achyad biasa dikenal dengan Muhammad Dahlan (bukan KH. Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah). Ia lahir pada tanggal 30 Oktober 1885 M di daerah Kertopaten, Surabaya. Ia merupakan putra keempat dari enam bersaudara yang terlahir dari pasangan KH. Muhammad Achyad dan Nyai Hj. Mardliyah. KH. Ahmad Dahlan Achyad, juga merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Kebondalem Surabaya. Najmuddin Ramly dan Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah: Pemikiran dan Kiprah dalam Panggung Sejarah Muhammadiyah* (Jakarta: Best Media Utama, 2010), 55.

[17]Arsip, NO. B120090167.2, *Riwayat Taswirul Afkar* oleh Hamim Syahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya kelompok diskusi ini membahas berbagai masalah keagamaan, kemasyarakatan dan juga bagaimana mempertahankan sistem bermadhab.

Pada awalnya Taswirul Afkar sangat sederhana, bersifat lokal dan terbatas pada kalangan orang-orang tertentu seperti para ulama. Oleh karena terbatasnya anggota yang terhimpun dalam kelompok diskusi tersebut maka Taswirul Afkar kurang dikenal secara umum oleh masyarakat. Namun, dikarenakan sang pendiri menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagamaan, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat di kalangan umat Islam Indonesia pada akhirnya kelompok diskusi ini menarik minat masyarakat terutama para pemuda untuk ikut serta di dalamnya.

Pada akhirnya Taswirul Afkar merupakan suatu tempat perdebatan yang intensif dan menarik perhatian. Di situlah banyak tokoh Islam dari organisasi lain bertemu dan memanfaatkan kelompok diskusi ini untuk memecahkan masalah-masalah agama yang sedang mereka hadapi. Beberapa tokoh Islam dari organisasi lain tersebut diantaranya adalah Syekh Ahmad Soorkati (1872-M), pendiri perkumpulan al-Irsyad dan KH. Ahmad Dahlan (1869-M). Para tokoh Islam tersebut biasanya membahas tentang permasalahan agama yang sedang dihadapi pada waktu itu. Pada pelaksanaan kegiatannya, kelompok diskusi tersebut kemudian berkembang pada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan *khilafiyah*[18] dalam Islam, yakni mengenai madhab dan ijtihad.

[18]Secara umum *khilafiyah* berarti perbedaan pendapat atau pandangan ulama dalam berbagai persoalan, baik masalah keagamaan maupun yang lain/ diperselisihkan atau kontroversial, artinya dalam dirinya sendiri mengandung potensi atau kemungkinan untuk disetujui atau tidak disetujui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai langkah awal dalam menjalankan gagasannya tersebut, KH. Wahab bersama teman belajarnya ketika di Timur Tengah, KH. Mas Mansur dan KH. Ahmad Dahlan Achyad menetapkan beberapa tujuan dari kelompok diskusi tersebut, antara lain:

1. Membina kontak yang dinamis antara sejumlah tokoh agama dan intelektual dengan mengedepankan berbagai masalah kehidupan dari yang bersifat keagamaan murni sampai pada masalah politik perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda.
2. Menyalurkan aspirasi para pemuda dan menghimpunnya dalam suatu ikatan yang potensial, dan diharapkan semangat kebangsaan yang bergelora di hati para pemuda menjadi semakin kuat dan berlandaskan agama.[19]

Setelah perdebatan yang dilakukan oleh kelompok diskusi tersebut berjalan secara berangsur-angsur, pada akhirnya hasilnya adalah adanya perpecahan antaranggota dan menjadi dua kelompok Islam di Indonesia. Kelompok yang dimaksudkan adalah kelompok Islam-tradisional dan kelompok Islam-modern.

Namun, meskipun diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Taswirul Afkar menyebabkan timbulnya Islam-tradisional dan Islam-modern, kelompok ini memiliki arti penting bagi perkembangan pengetahuan Islam di Indonesia karena kelompok diskusi tersebut merupakan kelompok diskusi pertama di Indonesia yang mempertemukan antara kelompok Islam-tradisional dan

---

Nina M. Armando, et al., *Ensiklopedi Islam Jilid 4* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) 108.

[19]Zuhri, *Almaghfur-lah*, 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam-modern guna mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sangat kontroversial pada saat itu.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Taswirul Afkar pada kenyataannya tidak hanya melibatkan para ulama saja tetapi, juga menjadi tempat komunikasi dan tukar informasi antartokoh nasionalis seperti dr. Wahidin Sudirohusodo dan HOS Tjokroaminoto. Taswirul Afkar juga turut menjadi jembatan komunikasi bagi generasi muda dan generasi tua. Dalam kegiatan selanjutnya, Taswirul Afkar tidak hanya membahas tentang permasalahan keagamaan saja tetapi kelompok ini menginginkan hal yang lebih yaitu menggalang para intelektual dan ulama untuk menentang para penjajah kolonial Belanda.

Pada perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1918 Taswirul Afkar ditingkatkan fungsinya sebagai sebuah lembaga pendidikan dengan nama Suria Sumirat Afdeling Taswirul Afkar sebab lembaga pendidikan ini merupakan bagian dari perhimpunan Suria Sumirat. Penggabungan dari nama tersebut adalah untuk mempermudah perizinan nasional dari pemerintah Belanda. Fungsi daripada lembaga pendidikan tersebut adalah untuk mendidik anak-anak setingkat Sekolah Dasar (SD) agar mereka dapat mendalami ilmu pengetahuan agama dan bertujuan untuk membekali siswa agar lebih memahami agama dan memiliki pola pikir yang berlandaskan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga pendidikan Taswirul Afkar yang berpusat di Ampel Denta, Surabaya didirikan oleh:[20]

1. KH. Abdul Wahab Chasbullah
2. KH. Ahmad Dahlan Achyad dari Kebondalem Surabaya
3. KH. Mas Mansur, dan
4. KH. Mangun

dan ketika lembaga pendidikan Taswirul Afkar bernama Suria Sumirat Afdeling Taswirul Afkar maka susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

1. KH. Ahmad Dahlan Achyad sebagai ketua
2. KH. Alwan
3. KH. Abdullah
4. KH. Ihsan
5. KH. Abdul Qadir
6. KH. Ghazali
7. KH. Mangun

Pada perkembangan selanjutnya sampai menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, Taswirul Afkar masih memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai perwakilan utama dari golongan tradisional pada Kongres al-Islam yang membahas masalah *khilafiyah* yang dihadiri oleh organisasi-organisasi maupun para ulama Islam di Indonesia.

[20]Sejarah Yayasan Pendidikan *Taswirul Afkar* Surabaya, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keluarnya KH. Mas Mansur dari Taswirul Afkar

Kegiatan diskusi dalam Taswirul Afkar tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan tujuan kelompok diskusi tersebut jauh dari apa yang diinginkan yaitu mempersatukan para ulama untuk melawan para penjajah. Hal ini ditandai dengan keluarnya salah satu tokoh sentral pendiri Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan yakni KH. Mas Mansur sekitar tahun 1922. Meskipun terlihat adanya jalinan kerja sama dan ikatan yang kuat antara Kiai Wahab dan KH. Mas Mansur, akan tetapi diantara keduanya memiliki pemikiran yang sangat berbeda dalam hal memahami permasalahan keagamaan, terutama masalah-masalah *khilafiyah*.

Perbedaan pemikiran mereka terlihat ketika mengenai masalah bermadhab, kebebasan berijtihad,[21] tawasul[22] dan kunut.[23] Pemikiran Kiai Wahab tampak lebih cenderung kepada pemikiran para ulama tradisional, sedangkan pendapat KH. Mas Mansur lebih condong kepada paham-paham yang dianut oleh kaum modernisme seperti Muhammadiyah yang dibawa oleh KH. Ahmad Dahlan. Apalagi keluarnya KH. Mas Mansur adalah ketika pada tahun 1921 KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) acapkali datang ke Surabaya memberikan ceramah agama dan disitulah KH. Mas

[21]*Ijtihad* adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera di Alquran dan Sunnah. Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam Jilid 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) 136.

[22]Memohon atau berdoa kepada Allah Swt., dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* http://ebsoft.web.id

[23]Doa khusus, biasanya dibaca sesudah iktidal pada rakaat terakhir dalam salat Subuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* http://ebsoft.web.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mansur dapat terpengaruh dan memutuskan untuk mengikuti jejak KH. Ahmad Dahlan. Jabatan sebagai kepala sekolah di Nahdlatul Wathan ia lepaskan dan digantikan oleh KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz.[24] Perpecahan antara Kiai Wahab dengan KH. Mas Mansur juga terlihat dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pergeseran di Tanah Suci

Pada abad ke-20 M tepatnya pada tahun 1924 di Hijaz telah terjadi pergantian kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Pergolakan dan pergeseran tersebut tidak hanya sekedar fenomena politis, tetapi juga menyangkut aspek sosial keagamaan yang cukup mendasar. Kepemimpinan rezim Syarif Hussein di Mekkah berhasil ditumbangkan oleh Abdul Aziz ibnu Saud, seorang penganut setia paham Wahabi.[25]

Paham Wahabi merupakan sebuah gerakan keagamaan yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787 M), seorang tokoh yang berasal dari Uyainah, sebuah desa di Najd. Paham Wahabi yang diajarkannya memang tergolong keras dalam kemauan dan radikal dalam sikap serta keyakinan. Pada permulaan pencanangan ide-idenya, ia juga sempat diusir dari Uyainah oleh Amir Alhasa, seorang pemimpin Uyainah.

Di tempatnya yang baru yakni Hijaz, ide-ide Muhammad bin Abdul Wahab dapat diterima oleh masyarakat. Tampaknya paham yang disebarkan oleh Abdul Wahab di Hijaz mendapatkan respon yang sangat

[24]Anam, *Sejarah & Perkembangan NU*, 32.
[25] Yusuf, et al., *Dinamika Kaum Santri*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Hal tersebut terlihat dengan diproklamirkannya paham Wahabi sebagai paham negara resmi dimana Hijaz pada saat itu berada di bawah pemerintahan Ibnu Saud. Sebagaimana semboyannya "kembali kepada Alquran dan Hadis" dengan memberantas kesyirikan. Gerakan yang dilakukan oleh penganut Wahabi adalah membongkar kultus orang-orang suci, bangunan-bangunan makam dan apa saja yang dianggap keramat oleh pemujanya.

Pada akhir abad ke-19 gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh kaum Wahabi ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar di Indonesia. Beberapa penganut yang menyebarkan paham Wahabi memang sebelumnya pernah belajar di Mekkah. Sedikit demi sedikit gerakan tersebut mulai muncul terutama di Sumatera dan Jawa. Gerakan di Sumatera dipelopori oleh Thahir Jalaluddin. Namun, gerakan yang mereka sebarkan mendapat tantangan dari pihak lain. Sedangkan di Jawa gerakan yang bersemboyan "kembali kepada Alquran dan Hadis" tersebut memunculkan sebuah organisasi Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan yaitu Muhammadiyah pada tahun 1912.[26] Selain Muhammadiyah terdapat beberapa gerakan yang serupa seperti al-Irsyad yang dipelopori oleh Ahmad Soorkati pada tahun 1913 dan Persatuan Islam (Persis) yang dipelopori oleh A. Hassan Bandung pada tahun 1923.

Fenomena tersebut menimbulkan akibat yang serius bagi persatuan sehingga para ulama dari kalangan pesantren tidak dapat membiarkan hal

[26]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu terjadi. Bagi mereka persatuan dan kesatuan untuk menghadapi penjajah dianggap jauh lebih penting daripada hanya memperdebatkan masalah *khilafiyah* dan Kiai Wahab selaku sebagai perwakilan dari golongan tradisionalis Taswirul Afkar meminta agar penguasa Arab Saudi tetap menghormati tradisi keagamaan terdahulu serta menghormati ajaran-ajaran madhab imam besar.

2. Kongres Umat Islam Indonesia (*Muktamar Alam Islami Hindi as-Syarqiyah*)

Ketika di Mekkah sedang mengalami ketegangan menghadapi pertikaian masalah *khilafiyah*, beberapa eksponen dari Sarikat Islam di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto memutuskan untuk mengadakan kongres di Indonesia yang disebut dengan Kongres Umat Islam Indonesia (*Muktamar Alam Islami Hindi as-Syarqiyah*).[27] Tujuan kongres tersebut adalah untuk mencari titik temu bagi kalangan yang sedang dilanda pertikaian dengan maksud agar tidak mengganggu usaha perjuangan melawan penjajah. Sarikat Islam di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto yang notebene merupakan sebuah partai politik pada dasarnya memang tidak tertarik pada permasalahan keagamaan, apalagi yang berkaitan dengan permasalahan *khilafiyah*.

Kongres pertama diselenggarakan di Cirebon pada tanggal 31 Oktober-2 November 1922. Kongres tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi, baik dari Muhammadiyah, al-Irsyad, Sarikat Islam dan

[27]Yusuf, et al., *Dinamika Kaum Santri*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan "tradisi". Golongan tersebut diwakili oleh Kiai Wahab dan Asnawi dari Taswirul Afkar. Kongres yang bertujuan untuk mempersatukan umat serta meredam munculnya perdebatan permasalahan *khilafiyah* tersebut gagal dicapai, sebab Muhammadiyah kembali mengecam orang Islam yang masih bermadhab. Menurutnya, umat Islam harus kembali berpedoman pada Alquran dan Hadis saja tanpa berpedoman pada kitab-kitab karangan para ulama. Sebaliknya, Abdul Wahab berpendapat bahwa kitab-kitab ulama itu masih relevan sebagai alat untuk memahami hukum Islam dari sumber utamanya, Alquran dan Hadis.

Kongres selanjutnya diadakan di Surabaya pada tanggal 24-26 Desember 1924.[28] Dalam kongres kedua tersebut membicarakan permasalahan ijtihad, kedudukan tafsir *al-Manar* serta ajaran Muhammadiyah dan al-Irsyad. Muncul perdebatan antara golongan "tradisi" dari Taswirul Afkar dengan golongan "pembaru". Namun, pada perdebatan tersebut golongan tradisi dapat memberikan keputusan dalam kongres tersebut.

Pada kongres-kongres Islam selanjutnya, kegiatan-kegiatan diskusi lebih didominasi oleh golongan pembaru. Tetapi diantara golongan pembaharu tersebut juga muncul perdebatan seperti Muhammadiyah dan Persis yang tidak sependapat dengan Sarikat Islam yang cenderung tidak begitu menghiraukan permasalahan *khilafiyah*. Sebaliknya,

[28]Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah dan Persis bersikukuh untuk mempertahankan permasalahan *khilafiyah* guna memperbaiki umat Islam. Pertikaian semakin memuncak dan anggota dari masing-masing organisasi dilarang untuk masuk ke organisasi yang lain.

3. Komite Hijaz

Tahun 1924 telah terjadi keguncangan di Kesultanan Turki. Negara yang terkenal dengan konsep *khilafah*-nya tersebut dengan mudahnya dapat diganti dengan suatu pemerintahan lain yang berbentuk republik. Gagasan tersebut dipelopori oleh kaum nasionalis Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk.

Dengan tergantinya sistem pemerintahan di Turki, maka negara lain berinisiatif untuk membuat suatu kekhalifahan baru. Pada waktu yang hampir bersamaan tepatnya pada bulan Maret 1924, penguasa di Mesir juga akan mengadakan kongres tentang khilafat. Di Indonesia sendiri juga merespon rencana yang dilakukan oleh penguasa Mesir sehingga di Indonesia dibentuklah suatu Komite Khilafat dan diselenggarakan di Surabaya. Dengan diketuai oleh Wondoamiseno dari Sarikat Islam dan wakil ketuanya adalah KH. Abdul Wahab Chasbullah dari golongan tradisi. Delegasi dari golongan pembaru diwakili oleh Soerjopranoto dari Sarikat Islam dan H. Fachruddin dari Muhammadiyah.[29]

Dikarenakan kongres di Mesir diundur maka Komite Khilafat di Indonesia berpindah haluan pada gagasan kongres yang lain yaitu tentang

[29]Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagasan Ibnu Saud yang menjadi topik utama pada kongres Islam sebelumnya (di Yogyakarta pada bulan Agustus 1925 dan di Bandung pada bulan Februari 1926). Sebelumnya, satu bulan sebelum kongres diselenggarakan di Bandung sebenarnya juga diadakan kongres di Cianjur pada tanggal 8-10 Januari 1926. Pada pertemuan tersebut terdiri dari golongan pembaru yang memutuskan untuk mengirim delegasi ke Kongres Khilafat di Mekkah hanya dari golongan mereka saja yaitu HOS Tjokroaminoto dari Sarikat Islam dan Mas Mansur dari Muhammadiyah. KH. Abdul Wahab Chasbullah yang dari kalangan ulama pesantren secara otomatis tidak dimasukkan dalam daftar. Kiai Wahab tetap berusaha untuk menitipkan usul kepada delegasi yang akan berangkat ke Mekkah agar penguasa baru di Saudi tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlaku disana serta menghormati ajaran-ajaran madhab-madhab imam besar. Usul tersebut telah ditolak oleh golongan pembaru, merasa aspirasinya tidak tertampung maka Kiai Wahab memutuskan untuk keluar dari Komite Khilafah dan membentuk sebuah panitia khusus bagi para ulama yang memiliki pemikiran yang sama. Panitia tersebut disebut dengan Komite Hijaz dan dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 di rumah Kiai Wahab, Kertopaten, Surabaya.

Adapun keputusan dari Komite Hijaz antara lain:

a. Meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Saud kembali ke tanah air.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membentuk *jam'iyah* (organisasi) untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya cita-cita *izzul Islam wa al-muslimin*. Atas usul dari Alwi Abdul Aziz, Jam'iyah ini diberi nama Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan para ulama.[30]

Dari rapat tersebut diputuskan untuk mengirim delegasi sendiri ke Kongres Umat Islam di Mekkah yaitu KH. Abdul Wahab Chasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Almishry. Tugas daripada delegasi tersebut adalah untuk menyampaikan tuntutannya agar ajaran-ajaran empat madhab imam besar tetap dihormati.

[30]Zuhri, *KH Abdul Wahab Hasbullah*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id